

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur sudah terlaksana, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan ini sehingga dapat menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa indikator di bawah ini

4.1.1. Implementasi Kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur

- a. Tepat target, berkaitan dengan kemampuan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ini ketepatan target belum dinilai optimal, karena belum sepenuhnya mencapai target kebijakan yakni dalam menghilangkan anggapan masyarakat terkait adanya pelabelan sekolah favorit dan non favorit yang ditandai dengan masih adanya sebagian masyarakat yang memilih sekolah berdasarkan prestasi akademik sekolah, reputasi sekolah dan fasilitas sekolah.
- b. Tepat lingkungan, dilihat dari indikasi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antar pelaksana dan lingkungan eksternal kebijakan berkaitan dengan persepsi masyarakat. Pada lingkungan internal kebijakan menunjukkan bahwa sudah tepat karena adanya kerjasama yang

terjalin antar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan PPDB baik pada tingkat provinsi, kota hingga sekolah. Namun, kondisi lingkungan eksternal kebijakan belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan, karena masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa dibatasi dalam mendaftar sekolah sesuai dengan keinginannya karena adanya penetapan wilayah zonasi.

4.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur

- a. Faktor Pendukung implementasi kebijakan, terdiri dari:
 - 1) Standar dan sasaran, dalam implementasi kebijakan ini menjadi faktor pendukung kebijakan karena telah terdapat kejelasan standar dan sasaran kebijakan yang tercantum pada regulasi yang mengatur baik dari Undang-Undang hingga Keputusan Gubernur DKI Jakarta serta adanya petunjuk teknis terkait dengan pedoman terselenggaranya kebijakan PPDB di Jakarta.
 - 2) Sumber daya dapat dilihat dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, kondisi sumber daya manusia, sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana, sumber daya finansial berupa anggaran yang menunjukkan bahwa seluruh kondisi sumber daya sudah baik dalam upaya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini.
 - 3) Karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari struktur organisasi dan koordinasi antar para pelaksana. Dalam implementasi kebijakan ini menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi karena

pelaksanaan kebijakan pada tingkat provinsi, kota bahkan pada tingkat sekolah telah terdapat susunan kepanitiaan PPDB dan pembagian tugas telah disesuaikan dengan kebutuhan kebijakan sehingga mempermudah proses implementasi kebijakan ini sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

- 4) Disposisi atau sikap implementor dapat dilihat dari perspektif para implementor dan tindakan pelaksana terhadap kebijakan. Disposisi implementor menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen para implementor pun sudah sangat baik yang dibuktikan dengan adanya kepatuhan para implementor dalam melaksanakan tugas yang telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

b. Faktor Penghambat implementasi kebijakan, terdiri dari:

- 1) Komunikasi antar organisasi, dalam kebijakan ini juga berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam belum berjalan dengan optimal, hal tersebut ditandai dengan sosialisasi pada tingkat sekolah hanya terkait dengan substansi wilayah saja, dengan mengundang ketua RT dan RW sekitar sekolah yang masuk ke dalam daftar zona prioritas dalam kebijakan PPDB sistem zonasi. Namun sosialisasi yang dilakukan belum menekankan dari segi teknis terkait pelaksanaan PPDB, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami seputar prosedur PPDB dan kerap kali mengalami kendala pada saat pelaksanaan PPDB karena terdapat

masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi pelaksanaan PPDB.

- 2) Kondisi ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan ini, dapat dilihat dari opini dan respon masyarakat terhadap kebijakan. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, bagi masyarakat yang berdomisili jauh dengan sekolah dan memiliki usia yang tergolong muda maka merasa kesulitan dan dirugikan karena memiliki peluang kecil pada PPDB sistem zonasi. Sehingga sebagian masyarakat mensiasati KK yang dimilikinya dengan mengubah domisili untuk mendekatkan alamatnya ke sekolah tujuan. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat sebagian masyarakat yang memberikan respon negatif terhadap kebijakan ini sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

4.2. Saran

4.2.1. Implementasi Kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur

- 1) Tepat Target: Terkait dengan masih adanya anggapan masyarakat terkait pelabelan sekolah favorit dan non favorit, peneliti merekomendasikan bahwa upaya yang dapat dilakukan yakni pemerintah setempat bersama dengan sekolah dapat terus melakukan proses perbaikan pendidikan, yakni dari ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan sekolah sehingga diharapkan dengan perlahan dapat menghilangkan anggapan terkait adanya sekolah favorit.

- 2) **Tepat Lingkungan:** Terkait lingkungan eksternal kebijakan, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa dibatasi dalam mendaftar sekolah sesuai dengan keinginannya karena adanya penetapan wilayah zonasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat dilakukan sosialisasi sebagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan PPDB pada jalur zonasi saja, namun melainkan juga tetap berusaha untuk mendaftar melalui jalur-jalur lain sesuai dengan kriteria yang berlaku. Karena mengingat bahwa pelaksanaan PPDB jalur zonasi dilaksanakan setelah adanya hasil seleksi dari PPDB pada jalur lainnya seperti jalur prestasi, afirmasi dan jalur lainnya.

4.2.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur

- 1) **Komunikasi antar Organisasi:** Terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat hanya sebatas substansi kewilayahan, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya upaya pengoptimalisasian sosialisasi yang dilakukan oleh panitia PPDB pada tingkat sekolah dengan mengundang RT dan RW sekitar sekolah. Penyampaian informasi secara langsung juga harus terkait dengan aturan dan prosedur PPDB. Selain itu, dapat dilakukan pengoptimalan pemanfaatan media sosial seperti Instagram, facebook, twitter dan *website* Dinas Pendidikan sebagai upaya dalam penyebarluasan informasi terkait PPDB. Sehingga dalam hal ini, panitia PPDB tingkat sekolah selalu menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara langsung dihibau untuk mendampingi masyarakat apabila terdapat keluhan dan mengalami kendala dalam proses pelaksanaan PPDB.

- 2) Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik: Terkait Masih adanya masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini karena proses seleksi berdasarkan wilayah dan usia, sehingga perlu adanya upaya optimalisasi dalam penetapan standar dalam persyaratan bagi CPDB untuk mendaftar baik dari segi wilayah zona prioritas maupun kriteria usia dalam PPDB sistem zonasi. Aktor kebijakan harus melakukan optimalisasi terhadap wilayah RT maupun RW yang belum masuk ke daftar zona prioritas, sehingga terjadi perluasan wilayah agar masyarakat pada wilayah tersebut dapat memiliki peluang yang cukup besar untuk diterima pada sekolah negeri. Karena masyarakat cenderung akan memilih sekolah manapun yang penting dekat dengan sekolahnya sehingga mendukung penghapusan adanya pelabelan sekolah favorit dan non favorit.